BAB II

RIWAYAT HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT DAN VIETNAM

A. Sejarah Vietnam

1. Masa Pra-dinasti

Pada tahun 214 SM, beberapa tahun setelah Kaisar Qin Shihuang mempersatukan Tiongkok, ia mengirim bala tentara ke selatan Tiongkok untuk menaklukkan wilayah yang sekarang adalah Guangdong, Guangxi, Fujian dan utara Vietnam. Penaklukkan itu disertai dengan penaklukkan suku kuno Bai Yue. Setelahnya, Dinasti Qin mendukung migrasi suku Han secara besar-besaran ke selatan dan membentuk 3 provinsi di selatan.

Selang puluhan tahun kemudian, tahun 203 SM, Dinasti Qin terpuruk ke dalam kekacauan. Pada saat ini, pemimpin militer Qin di Nanhai (sekarang Vietnam Utara), Zhao Tuo mengambil kesempatan ini untuk membentuk negara sendiri, Nan Yue, dengan Raja Wu. Ibukota Negara Nan Yue berada di daerah Guangzhou sekarang. Namun, Nan Yue kemudian ditaklukkan oleh Kaisar Han Wudi dari Dinasti Han pada tahun 111 SM. Untuk lebih dari 10 abad selanjutnya, Vietnam utara secara langsung dikuasai oleh Dinasti Han, Dong Wu, Dinasti Jin, Dinasti Selatan, Dinasti Sui dan Dinasti Tang.[21]

---

[21] Taylor, Keith Weller (1996). *Asian Forms of the Nation*. Richmond, Surrey, UK:

2. Masa Dinasti-dinasti

Pada 939 CE, orang-orang Vietnam berhasil mengalahkan militer Tiongkok di Sungai Bach Dang dan mendapatkan kemerdekaan setelah 10 abad di bawah kontrol Tiongkok. Mereka mendapatkan otonomi secara lengkap satu abad kemudian. Pada masa pemerintahan Dinasti Tran, Dai Viet mengalahkan tiga usaha invasi Mongol di bawah Dinasti Yuan. Tiga kali dengan pasukan yang sangat besar juga dengan persipan yang hati-hati untuk serangan mereka, tetapi tiga kali berturut-turut orang-orang Mongol dikalahkan sama sekali oleh Dai Viet. Secara kebetulan, pertempuran terakhir dimana Jendral Vietnam, Tran Hung Dao mengalahkan kebanyakan militer Mongol diadakan lagi di Sungai Bach Dang seperti nenek moyangnya kurang lebih 300 tahun yang lalu.

Feodalisme di Vietnam mencapai titik puncaknya saat Dinasti Le pada abad ke 15, khususnya selama masa pemerintahan Kaisar Le Thanh Tong. Antara abad ke-11 dan 15, Vietnam memperluas wilayahnya ke arah Selatan dalam proses yang disebut Nam Tien (Perluasan ke Selatan). Mereka akhirnya menaklukan kerajaan Champa dan banyak kekaisaran Khmer.[22]

3. Masa Kolonialisme Perancis

Kemerdekaan Vietnam berakhir pada pertengahan abad ke-19 AD (Setelah Masehi), ketika Vietnam dikolonialisasikan oleh Kerajaan

---

[22] "The Trần Dynasty and the Defeat of the Mongols". Diakses dari http://asuntrystudies.us, pada

Perancis. Pemerintahan Perancis menanamkan perubahan signifikan dalam bidang politik dan kebudayaan pada masyarakat Vietnam. Sistem pendidikan modern gaya barat dikembangkan dan Agama Kristen diperkenalkan kepada masyarakat Vietnam. Pengembangan ekonomi perkebunan untuk mempromosikan ekspor tembakau, nila (indigo), teh dan kopi, Perancis mengabaikan permintaan akan pemerintahan sendiri (*self-government*) dan hak-hak sipil yang terus meningkat. Sebuah pergerakan politik nasionalis dengan cepat muncul, dan pemimpin muda Ho Chi Minh memimpin permintaan akan kemerdekaan kepada *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa). Tetapi, Perancis memelihara dominasi kontrol terhadap koloni-koloninya hingga Perang Dunia II, ketika perang Jepang di Pasifik memicu penyerbuan ke Indocina. Sumber daya alam Vietnam dieksploitasi untuk kepentingan kampanye militer Jepang ke Burma, Semenanjung Malaya dan India. Pada tahun terkahir perang, pemberontakan pasukan nasionalis muncul di bawah Pimpinan Ho Chi Minh, melakukan kemerdekaan dan komunisme.

Menyusul kekalahan Jepang, pasukan nasionalis melawan pasukan kolonial Perancis pada Perang Indocina Pertama yang dimulai pada tahun 1945 hingga 1954. Perancis mengalami kekalahan besar pada Pertempuran Dien Bien Phu dan dalam waktu singkat setelah itu ditarik dari Vietnam.

menjadi dua yaitu, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sesuai Perjanjian Jenewa (*Geneva Accords*).[23]

4. Perang Vietnam

Pemerintahan Komunis atas Vietnam Utara ditolak oleh Amerika Serikat karena kemiripannya dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina (RRC). Ketidaksetujuan dengan segera muncul atas ide pemilihan umum dan reunifikasi (Vietnam Utara dan Selatan), dan Amerika Serikat mulai meningkatkan kontribusi penasihat militer, bahkan Uni Soviet menyuplai tentara dan persenjataan untuk memperkuat militer komunis. Serangan kontroversial atas kapal Amerika Serikat di Teluk Tonkin memicu serangan militer Amerika Serikat terhadap instalasi milter Vietnam Utara dan penempatan lebih dari 500.000 tentara di Vietnam Selatan. Pasukan Amerika Serikat dengan segera dibingungkan oleh sebuah perang gerilya yang buruk dengan Viet Cong, milisi komunis Vietnam Selatan.

Pasukan Vietnam Utara gagal dalam usaha penyerbuan terhadap Vietnam Selatan pada tahun 1968 *Tet Offensive* dan perang dengan segera menyebar ke negara tetangga seperti Laos dan Kamboja. Dengan korban yang menggunung, Amerika Serikat mulai memindahkan tugas perjuangan ke militer Vietnam Selatan dalam proses yang dikenal sebagai Vietnamisasi. Usaha tersebut membuahkan hasil yang campur aduk, tetapi dengan dukungan Amerika Serikat, Vietnam Selatan mampu bertahan.

---

[23] "*French Counterrevolutionary Struggles: Indochina and Algeria*", diakses dari

Perjanjian Damai Paris (*Paris Peace Accords*) pada 27 Januari 1973 mengakui kekuasaan tertinggi kedua belah pihak. Di bawah perjanjian terebut, seluruh pasukan perang Amerika Serikat ditarik pada 29 Maret 1973. Pertempuran kecil tetap berlanjut, tetapi semua pertempuran besar telah berakhir hingga sekali lagi, Tentara Vietnam Utara menginvasi dan menundukkan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Vietnam Selatan dengan singkat menjadi Republik Vietnam Selatan, sebuah negara boneka di bawah kekuasaan militer Vietnam Utara, sebelum secara resmi disatukan dengan Vietnam Utara di bawah pemerintahan Komunis sebagai Republik Sosialis Vietnam pada 2 Juli 1976.[24]

5. Pasca Perang Vietnam

Dampak dari pengambil-alihan kontrol, Komunis Vietnam melarang partai politik lain, menahan tersangka yang diduga berkolaborasi dengan Amerika Serikat dan memulai kampanye massal tentang kolektifisasi pertanian dan pabrik-pabrik. Rekonstruksi negara yang porak poranda akibat perang terjadi sangat lambat dan masalah kemanusiaan yang serius dan masalah-masalah ekonomi menghadapi rezim komunis. Pada 1978, Militer Vietnam menginvasi Kamboja untuk melepaskan bekas rekan mereka, Khmer Rouge, dari penindasan. Aksi ini memperburuk hubungan dengan RRC, yang meluncurkan serangan mendadak kepada Vietnam

[24] [illegible]

Utara pada 1979. Konflik ini menyebabkan Vietnam lebih semakin bergantung terhadap bantuan ekonomi dan militer dari Uni Soviet.[25]

Dalam sebuah perubahan sejarah pada 1986, Partai Komunis Vietnam (PKV) mengimplementasikan reformasi pasar bebas (*free-market*) yang dikenal sebagai "Doi Moi" (Kebijakn Renovasi). Dengan kekuasaan negara tetap tak tertandingi, kepemilikan pribadi atas pertanian-pertanian dan perusahaan-perusahaan, deregulasi dan investasi asing dipacu.

Dengan demikian ekonomi Vietnam mencapai pertumbuhan yang cepat dalam produksi bidang pertanian dan perindustrian, konstruksi dan perumahan, ekspor dan investasi asing. Vietnam sekarang adalah salah satu di antara negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Secara politik, reformasi belum terjadi. Partai Komunis Vietnam mempertahankan kontrol atas semua organ-organ pemerintah.[26]

B. Hubungan Bilateral Vietnam dan Amerika Serikat

Pasca Perang Dunia II keterlibatan militer Amerika Serikat di Vietnam berawal pada tahun 1960-an, dengan pengiriman penasihat militer untuk membantu Pemerintah Vietnam Selatan dalam pertempuran dengan Komunis Vietnam Utara dan masyarakat adat pasukan komunis (Vietnam Selatan). Setelah itu, kehadiran Amerika Serikat meningkat. Pada saat pemerintahan Nixon mengundurkan pasukan Amerika Serikat

---

[25] "*Chinese Invasion of Vietnam - February 1979*" diakses dari http://www.globalsecurity.org/ pada tanggal 30 Maret 2013

[26] [illegible]

pada tahun 1973, jutaan tentara Amerika Serikat bertugas di Vietnam, dengan lebih dari 50.000 orang tentara tewas. Perang menjadi semakin tidak populer di Amerika Serikat. Pada tahun 1973, setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Paris yang mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di Vietnam, Kongres mulai memotong permintaan bantuan militer dan ekonomi ke Vietnam Selatan.

Hubungan diplomatik dan ekonomi Amerika Serikat-Vietnam hampir tidak ada selama lebih dari 15 tahun setelah kemenangan Vietnam Utara pada tahun 1975 atas Vietnam Selatan. Amerika Serikat mempertahankan embargo perdagangan dan menghentikan bantuan asing untuk Vietnam.[27] Hambatan untuk meningkatkan hubungan termasuk tuntutan Amerika Serikat bahwa Vietnam mundur dari Kamboja (yang diinvasi Vietnam pada tahun 1978), tuntutan Pemerintah Vietnam kepada Amerika Serikat sebagai timbal balik dari informasi tentang tahanan perang Amerika Serikat (Prisoner of War/ POW) atau Tentara Amerika Serikat yang hilang dalam aksi (Missing in Action / MIA) bahwa Amerika Serikat harus memberikan beberapa miliar dolar dalam bentuk bantuan rekonstruksi pasca perang, yang mereka klaim telah dijanjikan oleh Pemerintahan Nixon.

Serangkaian tindakan oleh Pemerintah Vietnam pada tahun 1978 secara khusus memiliki efek negatif jangka panjang pada hubungan Amerika Serikat-Vietnam. Vietnam mensejajarkan diri secara ekonomi

[27] N. Chanda, 1986, *Brother Enemy*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, p. 143

dan militer dengan Uni Soviet dan menginvasi Kamboja, serta mendirikan pemerintahan yang didukung oleh 200.000 pasukan Vietnam. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Vietnam juga dipengaruhi oleh eksodus ratusan ribu "manusia perahu" Vietnam termasuk bangsa etnis Tionghoa, yang melarikan diri atau diusir dalam program reunifikasi keras Vietnam.

Pada pertengahan 1980-an Vietnam mulai mempersiapkan diri dan mengatur langkah-langkah normalisasi hubungan luar negrinya dengan Amerika serikat. Di dalam negeri Vietnam sendiri, kondisi ekonomi dan isolasi diplomatik mendorong PKV untuk menerapkan kebijakan politik yang lebih pragmatis, kurang ideologis. Hanoi mengadopsi reformasi ekonomi berorientasi pasar bebas (dijuluki Doi Moi, atau "Kebijakan Renovasi"), melonggarkan banyak kontrol politik dalam negeri, dan mulai mencari cara untuk menarik diri dari Kamboja.

Kerjasama mengenai isu POW/MIA Amerika Serikat-Vietnam mulai membaik setelah kunjungan Jenderal John Vessey, Utusan Khusus Presiden Reagan untuk Isu POW/MIA ke Vietnam pada tahun 1987. Vietnam menarik pasukan dari Kamboja pada tahun 1989 dan mencari penyelesaian damai kompromi di sana. Kemudian selanjutnya pada pemerintahan George H.W. Bush, Amerika Serikat memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan Hanoi, yang juga tertarik dalam memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat. Pada April 1991, Amerika Serikat menyetujui sebuah "*road map*" yang rinci untuk normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam. Tahun-tahun

berikutnya, Vietnam memungkinkan Amerika Serikat untuk membuka kantor di Hanoi untuk menangani urusan POW/MIA.

Pada tahun 1993, Presiden Clinton memberikan bantuan keuangan internasional kepada Vietnam sebagai tanda akhir dari oposisi hubungan antara Amerika Serikat untuk Vietnam menerima bantuan keuangan internasional. Pada bulan Februari 1994, Presiden Clinton mengumumkan akhir embargo perdagangan Amerika Serikat dan Vietnam. Dua bulan kemudian, Kongres menyetujui F*oreign Relations Authorization Act,* tahun fiskal 1994 dan 1995 (PL 103-236), yang berisi salah satunya adalah bagian yang menyatakan dukungan senat terhadap ruang untuk normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam. Presiden Clinton terus memajukan hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam dengan menunjuk duta besar pertama pasca perang ke Vietnam pada tahun 1997 dan menandatangani Perjanjian Perdagangan Bilateral (BTA) Amerika Serikat-Vietnam pada tahun 2001. Selama periode ini, proses normalisasi ini dimungkinkan oleh keinginan strategis Vietnam untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, melanjutkan perbaikan kerjasama dalam POW/MIA, upaya reformasi yang sedang berlangsung di Vietnam, dan dengan kerjasama umum Vietnam pada masalah pengungsi.

Presiden Clinton mengunjungi Vietnam dari tangaal 16-20 November 2000, perjalanan pertama oleh seorang Presiden Amerika Serikat sejak Richard Nixon pergi ke Saigon (sekarang Ho Chi Minh City) pada tahun

oleh ribuan masyarakat Vietnam, yang memadati jalan-jalan untuk menyapa atau melihat sekilas Presiden dan Ibu Negara Amerika Serikat. Ledakan spontan itu, dikombinasikan dengan pernyataan publik kepada Presiden Amerika Serikat tentang Hak Asasi Manusia dan demokratisasi, memicu tanggapan retoris dari para pemimpin Vietnam konservatif. Selama kunjungan, para pemimpin Vietnam menekan Amerika Serikat untuk memberikan kompensasi bagi korban *Agen Oranye*, sebagai balas jasa untuk bantuan menemukan sisa-sisa tentara Vietnam yang masih hilang, dan untuk peningkatan program bantuan bilateral ekonomi Amerika Serikat.

Kemajuan menuju dimulainya kembali hubungan bilateral yang normal berlanjut di bawah pemerintahan George W. Bush. Meskipun keprihatinan tentang catatan Hak Asasi Manusia pemerintah Vietnam, Kongres meratifikasi BTA Amerika Serikat-Vietnam pada Oktober 2001, perjanjian baru itu resmi diberlakukan pada 10 Desember 2001. Berdasarkan BTA, Amerika Serikat mengabulkan permintaan Vietnam mengenai hubungan perdagangan normal bersyarat (*Normal Trade Relations /NTR*), sebuah langkah yang secara signifikan mengurangi tarif Amerika Serikat pada kebanyakan impor dari Vietnam.

Sebagai imbalannya, Hanoi setuju untuk melakukan langkah-langkah liberalisasi pasar. Status NTR bersyarat Vietnam diperbaharui setiap tahun sampai Desember 2006, perdagangan yang komprehensif dan tagihan

sebagai bagian dari perjanjian yang lebih luas yang melihat Vietnam menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 11 Januari 2007.[28]

Selama pemerintahan Bush, aspek diplomatik dan strategis hubungan Amerika Serikat dan Vietnam secara dramatis ditingkatkan ke titik di mana kedua negara memiliki normalisasi hubungan bilateral, setidaknya dari sudut pandang Amerika Serikat. Namun banyak orang Vietnam masih menganggap agar hubungan tidak sepenuhnya dinormalisasi sampai Amerika Serikat memberikan kompensasi lebih untuk korban "*Agent Oranye*".

[28] Mark E. Manyin, William H. Cooper, and Bernard A. Gelb, *Vietnam PNTR Status and WTO Accession: Issues and Implications for the United States*, CRS Report RL33490